



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : TEJA ARIEF WIBAWA
- Jabatan** : KEPALA BALAI PELAYANAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
- NHK** : 804379

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.344.400.000**

- Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 333.000.000
- Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 700.000.000
- Tanah Seluas 806 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 199.000.000
- Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 56.200.000
- Tanah Seluas 1.715 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 56.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **194.000.000**

- MOTOR, HONDA NF11C1C M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, HONDA AFX12U21C08 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 VELOZ M/T Tahun 2021, LAINNYA Rp. 150.000.000
- MOTOR, HONDA H1B02N42LC A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI



	Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	11.150.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	11.793.490
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	1.561.343.490
III. HUTANG		Rp.	130.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.431.343.490

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.